

PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INFLASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Rima Astarty¹, Natasya Safitri¹, Zarpani¹, Erni Febrina Harahap^{1*}

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Bung Hatta

email: rimaastari5@gmail.com¹ natasyasafitri776@gmail.com¹ Zarpani10@gmail.com¹
ernifebrinaharahap@bunghatta.ac.id^{1*}

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi (UMP) dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi dan inflasi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan. Series data yang digunakan dalam penelitian ini selama 43 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai 2022. Sebelum dilakukan analisis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial semua variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dimana variabel investasi, UMP dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif. Secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan nilai determinasi 83,7%.

Kata Kunci: *Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi, Inflasi, Ketimpangan Pendapatan*

ABSTRACT : *This study aims to determine the effect of investment, government spending, provincial minimum wages and inflation on income inequality in Indonesia in 1980-2022. The independent variables used in this study are investment, government spending, the provincial minimum wage and inflation, while the dependent variable used is income inequality. The data series used in this study spanned 43 years from 1980 to 2022. Prior to analysis, classical assumption tests were performed which included normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests and autocorrelation tests. The analysis technique used in this study is multiple linear regression with the Ordinary Least Square (OLS) method. The results of the study show that partially all variables have a significant effect on income inequality in Indonesia, where the investment, UMP and inflation variables have a positive effect, while government spending has a negative effect. Simultaneously all independent variables influence income inequality in Indonesia with a determination value of 83.7%.*

Keywords: *Investment, Government Expenditures, Provincial Minimum Wage, Inflation, Income Inequality*

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh antara daerah satu dengan daerah lainnya atau wilayah yang sama. Ketimpangan ini menjadi masalah bagi semua negara, baik negara maju maupun negara-negara berkembang. Makin tinggi kesenjangan pendapatan, akan memperbesar terjadinya masalah sosial. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi akan terkait langsung dengan ketidakstabilan ekonomi, krisis finansial, beban hutang dan inflasi. Dampak negatif lainnya dari ketimpangan pendapatan yaitu dapat memunculkan demotivasi, ketegangan sosial, dan penurunan permintaan barang/jasa yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, dan masih menjadi isu penting untuk diatasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan antar individu tidak merata. Gini rasio digunakan menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa ketimpangan atau kesenjangan di Indonesia dari gini ratio tahun 2017 sebesar 0,39 yang masuk dalam kategori jenis ketimpangan rendah, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,384 dan di tahun 2020 menurun lagi menjadi 0,381. Hal ini menunjukkan hal yang menggembirakan dikarenakan tingkat kesenjangan dan ketimpangan semakin mengecil atau cenderung menuju pemerataan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa yang meningkat pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja sehingga akan memperoleh upah dan mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa akan menyerap tenaga kerja sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita, dan kesenjangan pun akan mengecil.

Tabel 1
Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2017-2020

Provinsi	2017	2018	2019	2020
ACEH	0.329	0.318	0.320	0.323
SUMATERA UTARA	0.335	0.311	0.320	0.316
SUMATERA BARAT	0.312	0.305	0.310	0.305
RIAU	0.325	0.347	0.330	0.329
JAMBI	0.334	0.335	0.320	0.320
SUMATERA SELATAN	0.365	0.341	0.330	0.339
BENGKULU	0.349	0.355	0.340	0.334
LAMPUNG	0.333	0.326	0.330	0.327
KEP. BANGKA BELITUNG	0.276	0.272	0.270	0.262
KEP. RIAU	0.359	0.339	0.340	0.339
DKI JAKARTA	0.409	0.390	0.390	0.399
JAWA BARAT	0.393	0.405	0.400	0.403
JAWA TENGAH	0.365	0.357	0.360	0.362
DI YOGYAKARTA	0.440	0.422	0.420	0.434
JAWA TIMUR	0.415	0.371	0.370	0.366
BANTEN	0.379	0.367	0.370	0.363

BALI	0.379	0.364	0.370	0.369
NUSA TENGGARA BARAT	0.378	0.391	0.380	0.376
NUSA TENGGARA TIMUR	0.359	0.359	0.360	0.354
KALIMANTAN BARAT	0.329	0.325	0.330	0.317
KALIMANTAN TENGAH	0.327	0.344	0.340	0.329
KALIMANTAN SELATAN	0.347	0.340	0.330	0.332
KALIMANTAN TIMUR	0.333	0.342	0.330	0.328
KALIMANTAN UTARA	0.313	0.304	0.300	0.292
SULAWESI UTARA	0.394	0.372	0.370	0.370
SULAWESI TENGAH	0.345	0.317	0.330	0.326
SULAWESI SELATAN	0.429	0.388	0.390	0.389
SULAWESI TENGGARA	0.404	0.392	0.400	0.389
GORONTALO	0.405	0.417	0.410	0.408
SULAWESI BARAT	0.339	0.366	0.370	0.364
MALUKU	0.321	0.326	0.320	0.318
MALUKU UTARA	0.330	0.336	0.310	0.308
PAPUA BARAT	0.387	0.391	0.390	0.382
PAPUA	0.398	0.398	0.390	0.392
INDONESIA	0.391	0.384	0.380	0.381

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017-2020)

Selain faktor investasi, ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Tujuan pengeluaran pemerintah antara lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan lain sebagainya. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan tergantung pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Secara teori, ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja akan menjadi pengangguran.

Di sisi lain inflasi dianggap murni fenomena moneter yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan suatu negara. Hal ini menjadi kekhawatiran pembuat kebijakan akan pertimbangan peningkatan distribusi pendapatan atau mengejar program stabilitas harga (Siami-Namin & Hudson, 2018). Pertumbuhan inflasi ini akan berdampak buruk bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan akan menciptakan ketimpangan pendapatan, jika peningkatan ini berlangsung dalam jangka panjang akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang semakin melebar (Kardita et al., 2018).

B. TINJAUAN TEORI

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi, sumberdaya manusia serta sumber daya alam (resources) yang tersedia. Menurut (Arsyad, 2010) terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, yaitu sebagai berikut: *pertama*, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita; *kedua*, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang; *ketiga*, ketidakmerataan pembangunan antar daerah; *keempat*, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Intensive), dimana persentase pendapatan dari penambahan modal lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, sehingga pengangguran bertambah; *kelima*, rendahnya mobilitas social; *keenam*, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; *ketujuh*, memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang; dan *kedelapan*, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; dan (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Kenaikan investasi selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: (a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; dan (c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. *Transfer payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, maupun pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya

berbeda. Hal ini berakibat semakin tingginya pengeluaran pemerintah maka diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Upah Minimum Provinsi

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam berproduksi. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah (Harahap, 2018). Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan. Upah Minimum terdiri atas : a. Upah Minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi; b. Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota; c. Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektorial di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi; d. Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektorial di daerah Kabupaten/Kota.

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga - harga barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika: (a) Terjadi kenaikan harga, bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya; (b) Bersifat umum, Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM, setiap terjadi kenaikan harga BBM maka harga – harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain; (c) Berlangsung terus menerus, dimana kenaikan harga yang bersifat umum dan cenderung meningkat dari hari ke hari dalam periode tertentu.

Hipotesis

1. Diduga investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Diduga Pengeluaran Pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
3. Diduga upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
4. Diduga inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

C. METODE ANALISIS

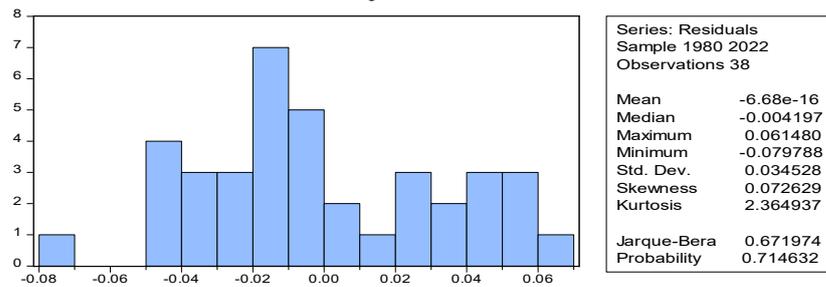
Penelitian ini menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas, independen, atau penjelas. Dalam penelitian ini adalah tingkat investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi dan inflasi. Sedangkan yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen, yaitu ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dan dapat diakses melalui website dari tahun 1980-2022.

D. ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (JB). Apabila nilai probabilitas > 5% maka residual terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas didapatkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai P-value (0,714632) > α (0,05).

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah oleh peneliti dengan Eviews 10

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat keberadaan dari hubungan linier yang sempurna atau tepat, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Mengikuti *rule of thumb*, apabila koefisien antar variabel lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Pada penelitian ini uji multikolinearitas menggunakan uji koefisien korelasi antar variabel independen. Bila nilai koefisien regresi < 0,85 maka data variabel bebas (tidak ada) multikolinearitas. Hasil uji pada penelitian ini memperlihatkan data yang bebas dari multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	Correlation			
	LINV	LPP	LUMP	LINF
LINV	1.000000	0.664227	0.750517	-0.617935
LPP	0.664227	1.000000	0.776091	-0.685374
LUMP	0.750517	0.776091	1.000000	-0.698634
LINF	-0.617935	-0.685374	-0.698634	1.000000

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan Eviews 10

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Park. P-value semua variabel independen > α (0,05), maka berdasarkan hasil uji heterokedastisitas ini menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengandung heterokedastisitas.

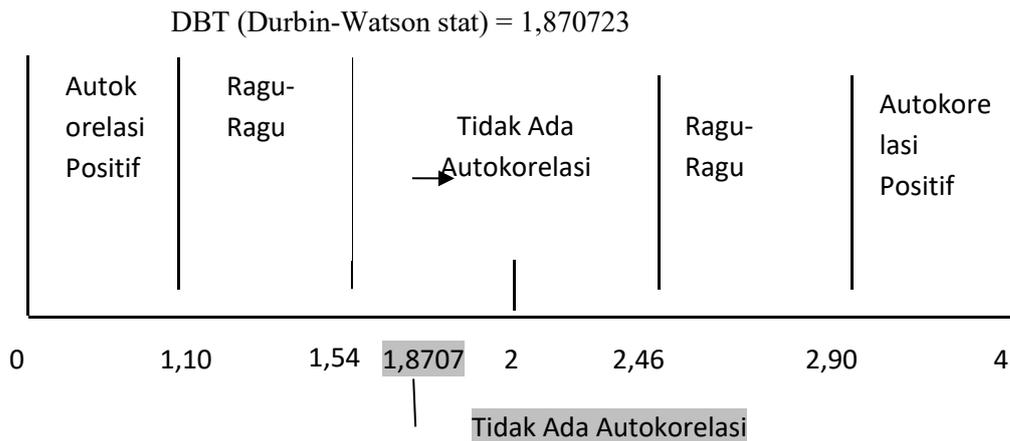
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LRES2
 Method: Least Squares
 Date: 06/06/23 Time: 21:02
 Sample: 1980 2022
 Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.64913	6.339260	-3.572834	0.0011
LINV	0.107643	0.371687	0.289607	0.7739
LPP	0.647575	0.423248	1.530013	0.1355
LUMP	0.043100	0.346150	0.124513	0.9017
LINF	2.003566	0.906116	2.211158	0.0742
R-squared	0.211744	Mean dependent var	-7.904659	
Adjusted R-squared	0.116198	S.D. dependent var	2.091055	
S.E. of regression	1.965817	Akaike info criterion	4.311772	
Sum squared resid	127.5264	Schwarz criterion	4.527244	
Log likelihood	-76.92367	Hannan-Quinn criter.	4.388435	
F-statistic	2.216144	Durbin-Watson stat	2.042966	
Prob(F-statistic)	0.088638			

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan Eviews 10

Uji Autokorelasi



Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Uji autokorelasi yang paling sederhana adalah menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

Regresi Linear Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Untuk mendapatkan hasil regresi antara variabel independen (investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi dan inflasi) terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan) maka digunakan data sekunder yang berasal dari BPS dan World Bank yang dicatat mulai dari tahun 1980-2022 yang diolah dengan menggunakan bantuan program Eviews.. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Dependent Variable: LKP
 Method: Least Squares
 Date: 06/06/23 Time: 20:43
 Sample: 1980 2022

Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.716097	0.117900	23.03728	0.0000
LINV	0.017819	0.006913	2.577733	0.0146
LPP	-0.029598	0.007872	-3.759986	0.0007
LUMP	0.003989	0.006438	0.619620	0.0397
LINF	0.018414	0.016852	1.092668	0.0224
-R-squared	0.837189	Mean dependent var		3.560487
Adjusted R-squared	0.817455	S.D. dependent var		0.085572
S.E. of regression	0.036561	Akaike info criterion		-3.657588
Sum squared resid	0.044111	Schwarz criterion		-3.442116
Log likelihood	74.49418	Hannan-Quinn criter.		-3.580925
F-statistic	42.42230	Durbin-Watson stat		1.870723
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah oleh peneliti dengan Eview 10

Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa variable investasi, UMP, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dan UMP meningkat maka ketimpangan pendapatan juga melebar. Investasi dalam hal ini lebih banyak berupa capital intensif yaitu peningkatan investasi tidaklah mengurangi pengangguran. Demikian juga dengan UMP yang mana adanya tenaga kerja yang tidak menerima upah sesuai dengan UMP atau merupakan pekerja informal. Sementara inflasi menunjukkan pengaruh positif artinya terkendalinya (rendah) inflasi maka ketimpangan pendapatan semakin rendah. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan artinya semakin banyak kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, maka semakin rendah ketimpangan pendapatan atau semakin merata distribusi pendapatan. Secara simultan investasi, pengeluaran pemerintah, UMP dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, Hal ini karena nilai P-value ($0,0000 < \alpha$ (5%). Nilai determinasi/R-squared = 0,837 yang berarti 83,7% kontribusi investasi, pengeluaran pemerintah, UMP dan inflasi terhadap naik turunnya ketimpangan pendapatan di Indonesia, sisanya 16,3% oleh variabel lain diluar model.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, UMP dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: dari hasil uji F, disimpulkan bahwa investasi, pengeluaran pemerintah, UMP dan inflasi selama periode penelitian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji parsial (uji t), variabel investasi, pengeluaran pemerintah, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negative. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,837 yang berarti 83,7% kontribusi investasi, pengeluaran pemerintah, UMP dan inflasi terhadap naik turunnya ketimpangan pendapatan di Indonesia, sisanya 16,3% oleh variabel lain diluar model.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur tim penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Universitas Bung Hatta khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang mana kajian ini merupakan diskusi panjang yang sering dibahas, dan juga kepada lembaga seperti World Bank, BPS, BI, serta lainnya yang telah memberi kemudahan dalam upaya pengumpulan data terkait.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini. (Agustus 2017). Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batu Bara Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*-Vol.13, No.2.
- Amdadull ah Baloch, Zaleha Mohd Noor, Muzafar Shah Habibulla h Dan Nor Yasmin Mhd Bani. (2018). The Effect Of The Gender Equality On Income Inequality. *Jurnal Ekonomi Malaysia*-Vol.52, No.2.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aulia Riyanti, Kasman Karimi. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatra Barat. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta*.
- Harahap, Erni Febrina, Rezka Yoli Amanda. 2022. Analisis Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Angkatan Kerja dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatra Barat. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*. Vol.10, No.2
- Harahap, Erni Febrina. 2018. Study Of Minimum Wage, Level Of Education, Employment Opportunity and Unemployment Educated: Empirical Study In Padang. *Journal of Business and Management*. Vol.10, No.3
- Harahap, Erni Febrina. 2015. The Linkage Model Of Sosial Economic Problems And Education On Poverty. *Proceedings International Conference on Global Education III*, Padang, 25-26 Mei 2015. ISBN. 9-786027-052512. Page 1610-1624.
- Hajiji, Ajid. 2010. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Riau 2002-2008. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Hanifa Tsuny Hasna. (Juni 2020). The Effect Of Economic Openness On Income Inequality At The Province Level In Indonesia. *Jurnal Ekonomi* -Vol.9, No.2.
- Hendarmin. (Desember 2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota DiProvinsi Kalimantan Barat. *Junal Ecces*-Vol.6, No.2.
- Kardita, A. A. G. D., Setiawina, N. D., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DAU, dan Share Expor Impor Terhadap PDRB, Terhadap Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 1777–1802.
- Lestari Agusalim, Dan Fanny Suzuda Pohan. (2018). Trade Openness Effect On Income Inequality. *Jurnal Ilmu Ekonomi*-Vol.7, No.1.
- Masri Fithrian, S T. Prof. Dr. Nur Syechalad, M.,Si, Dan Dr.Muhammad Nasir, M. Si. (Agustus 2015). Analisis Pengaruh Agregat Demand Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*-Vol.3, No.3.

- Muhammad Anshari, Zul Azhar dan Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *EcoGen-Vol.1, No.3*.
- Muhammad Abdul Malik Ridho dan Diana Wijayanti. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Vol.1, Issue.1*.
- Nita Tri Hartini. (2017). Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi-Vol.6, No.6*.
- Pratama Maesza, Guntur Eko Saputro, dan Panji Suwarno. (Januari 2022). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2000-2019. *Jurnal Cafeteria-Vol. 3, No. 1*.
- Raynal Yasni. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Artikel Akuntansi, Auditing, dan keuangan Vokasi-Vol.4, No.1*.
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Dan Muhammad Nasir. (Mei 2015). Pengaruh UPah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi-Vol.3, No.2*.
- Siami-Namin, S., & Hudson, D. (2019). Inflation and income inequality in developed and developing countries. *Journal of Economic Studies* 46(3) DOI:[10.1108/JES-02-2018-0045](https://doi.org/10.1108/JES-02-2018-0045)
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyono, Dwi Ariyani Dan Noer Sasongko. (Desember 2021). The Effect Of Fiscal Decentralization And foreign Direct Investment On Regional Income Inequality. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia- Vol. 6, No. 3*.
- Urmatul Uska Akbar, Yollit Permata Sari, Isra Yeni, Melti Roza Adry dan Dewi Zaini Putri. (November 2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development- Vol.9, No.4*.
- Wahyu Mantulangi Dan Fitri Hadi Yulia Akib. (Juli 2022). The Effect Of Primary, Secondary And Tertiary Economic Structures On Income Inequality In Sulawesi. *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)-Vol.3, No.7*.